

TAHUN
2020



INDIKATOR KINERJA UTAMA

IAIN PONTIANAK





**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PONTIANAK**

*Jl. Letjend. Soeprpto No. 19 Telp (0561) – 734170 Kode Pos 78121
Pontianak – Kalimantan Barat*

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK**

2020



**KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK
Nomor : Tahun 2020
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2020
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK

- Menimbang :
- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak
 - b. Peraturan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja pada Kementerian Agama.
 - c. Penetapan IKU harus sejalan dengan Sasaran Strategis yang hendak dicapai dalam Renstra IAIN Pontianak Tahun 2020-2024
 - d. Bahwa Penetapan Indikator Kinerja Utama IAIN Pontianak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor
 - e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak tentang Indikator Utama (IKU) Tahun 2020 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2013 tentang Perubahan STAIN Pontianak menjadi IAIN Pontianak;
 5. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Agama Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Agama 2020-2024;
11. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 172 Tahun 2014 yang telah diubah menjadi KMA Nomor 702 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Agama.
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja pada Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2020 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK
- PERTAMA : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Selanjutnya Indikator Kinerja Utama (IKU) IAIN Pontianak sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan acuan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan.
- KETIGA : Penyusunan Laporan Akuntabilitas kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja disampaikan kepada Menteri Agama melalui Sekretaris Jenderal Kementerian
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Pontianak
Tanggal : Maret 2020



Rektor,
Dr. H. Syarif, S. Ag., MA

DAFTAR ISI

SURAT KEPUTUSAN REKTOR	ii
DAFTAR ISI	lii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Landasan Hukum Penyusunan	2
II. PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA	4
A. Definisi	4
B. Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja.....	5
III. GAMBARAN UMUM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK ..	6
A. Visi dan Misi.....	6
B. Tugas dan Fungsi	7
C. Perjanjian Kinerja (Perjanjian Kinerja) IAIN Pontianak 2020	8
IV. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020.....	9
V. PENUTUP	12
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perjanjian Kinerja IAIN Pontianak Tahun 2020	7
Tabel 2. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama IAIN Pontianak Tahun 2020	10
Tabel 3. Indikator Kinerja IAIN Pontianak Tahun 2020	10

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan semaksimal mungkin dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut lembaga pemerintah harus mampu menerakan sistem yang kondusif bagi berlangsungnya pembangunan sejak dari perencanaan hingga proses evaluasi. Prinsip *Good Governance* atau pemerintahan yang baik merupakan sebuah komitmen yang mutlak dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan bercirikan profesionalisme, transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan demokratis dengan tetap menjunjung supremasi hukum. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam Indikator Kinerja.

Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Maka diperlukan kegiatan yang bertujuan untuk mengukur kinerja, khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Selain pengukuran kinerja, juga perlu kegiatan pengamatan terhadap perkembangan kinerja pelaksanaan kegiatan atau program dengan menggunakan informasi: (1) hasil pengukuran kinerja, dan (2) identifikasi, analisis serta antisipasi masalah yang timbul dan atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

Melalui Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang pedoman umum Penetapan Indikator Kerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja utama melibatkan pemangku kepentingan dilingkungan lembaga/ Instansi

pemerintah yang bersangkutan, maka Pimpinan Instansi Pemerintah diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama. Oleh sebab itu IAIN Pontianak sebagai salah satu Instansi Pemerintah yang menjalankan fungsi pemerintahan dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), seharusnya mewujudkan hal tersebut dengan menerapkan sistem yang kondusif bagi berlangsungnya program sejak dari perencanaan hingga proses evaluasi.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam Indikator Kinerja. Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran Indikator Kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap Instansi pemerintah sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan tujuan visi dan misi organisasi dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam RENSTRA maupun RKA-KL, yang telah ditetapkan. Sebagai bagian dari instansi pemerintah, maka IAIN Pontianak juga menjabarkan Sasaran Strategis ke dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU) atau *Key Performance Indicator* sebagai alat ukur yang dapat menginformasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan secara obyektif dan terukur dari pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) IAIN Pontianak.

B. Maksud Dan Tujuan

Maksud dan tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak disini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam melakukan fungsi pelaksanaan tugas Program Pendidikan Islam sesuai dengan Indikator Kinerja yang ditetapkan.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis IAIN Pontianak sehingga dapat digunakan untuk perbaikan Kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

C. Landasan Hukum

Peraturan atau dasar hukum dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak adalah :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
 9. Peraturan Menpan Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 10. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024;
13. Keputusan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Agama 2020-2024;
14. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 702 Tahun 2016 yang telah diubah menjadi KMA Nomor 94 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja pada Kementerian Agama.

BAB II

PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

A. Definisi

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RENSTRA maupun RKA-KL, yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi setingkat Eselon II/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah Indikator keluaran (Output) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis.

Peningkatan kinerja dengan menekankan akuntabilitas kinerja, setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama (*key performance indicators*) di lingkungan instansi masing-masing. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator kinerja utama instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja utama pada setiap tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (output) dan hasil (outcome). Indikator Kinerja Utama merupakan indikator yang paling menentukan (strategis) bagi kelangsungan hidup suatu organisasi. Indikator Kinerja Utama merupakan indikator kinerja yang dipilih dari sekian banyak indikator kinerja yang dimiliki organisasi tersebut.

Indikator kinerja utama digunakan instansi pemerintah untuk: 1) perencanaan jangka menengah; 2) perencanaan tahunan; 3) penyusunan dokumen penetapan kinerja; 4) pelaporan akuntabilitas kinerja; 5) evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan 6) Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan. Keberhasilan pencapaian sasaran strategis pada setiap tingkatan organisasi harus dinyatakan dengan indikator kinerja utama. Instansi Pemerintah melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian indikator kinerja utama untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Analisis dan evaluasi kinerja tersebut dilakukan secara berkala dan sederhana dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya. Dalam suatu Instansi pemerintah, Pimpinan perlu melakukan pembinaan dalam pengembangan dan penetapan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing, serta Koordinasi untuk

pengintegrasian sistem pengukuran kinerja dengan sistem administrasi pemerintahan yang lainnya baik perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban. Pengembangan dan penetapan indikator kinerja utama wajib menggunakan prinsip-prinsip kehati-hatian, kecermatan, keterbukaan, dan transparansi guna menghasilkan informasi kinerja yang handal. Jika indikator kinerja utama ini menimbulkan dampak negatif terhadap kinerja organisasi secara keseluruhan, maka pimpinan unit organisasi melaporkan kepada unit organisasi di atasnya agar ditentukan pengembangannya lebih lanjut untuk perbaikan. Penetapan indikator juga didasarkan pada masukan (*inputs*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*).

B. Syarat Kriteria Indikator Kinerja Utama

Pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama di lingkungan instansi pemerintah melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholders*) dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama harus mempertimbangkan beberapa hal berikut ini yaitu:

1. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/Daerah, Rencana Strategis, kebijakan umum dan atau dokumen strategis lainnya yang relevan;
2. Kewenangan, tugas dan fungsi, serta peran lainnya;
3. Kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
4. Kebutuhan data statistik pemerintah;
5. Kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan

Pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama juga harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan yaitu:

1. spesifik;
Indikator Kinerja harus spesifik mengacu pada apa yang akan diukur, sehingga mempunyai persepsi yang sama.
2. Dapat dicapai (*Measurable*);
Indikator Kinerja harus dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.
3. Indikator Kinerja yang ditetapkan *Achievable*;
Indikator Kinerja yang ditetapkan harus dapat dikumpulkan datanya oleh organisasi.

4. *Relevant*;

Indikator Kinerja harus merupakan alat ukur yang menggambarkan sedekat mungkin (keberhasilan/kegagalan) yang akan diukur.

5. *Timebond*.

menggambarkan suatu kinerja yang dapat dicapai untuk kurun waktu tertentu. Sedapat mungkin Indikator Kinerja juga fleksibel apabila dikemudian hari terjadi perubahan.;

BAB III

GAMBARAN UMUM IAIN PONTIANAK

A. Visi, Misi dan Tujuan IAIN Pontianak

1. Visi

“Ulung dan terbuka dalam kajian dan riset keilmuan, keislaman, serta kebudayaan Borneo”

2. Misi

Misi IAIN Pontianak adalah:

- a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang ulung dalam kajian keilmuan, keislaman dan kebudayaan Borneo.
- b. Membentuk akademisi yang berakhlak mulia, mandiri, dan bermanfaat bagi bangsa dan kemanusiaan.

3. Tujuan

Berdasarkan Statuta, tujuan IAIN Pontianak adalah, “menghasilkan lulusan yang ulung dalam bidang ilmu pengetahuan, keislaman dan kebudayaan Borneo yang bermanfaat bagi bangsa dan kemanusiaan”. Sedangkan berdasarkan Rencana Induk Pengembangan maka disusun tujuan IAIN Pontianak 2020-2038 sebagaimana tercantum berikut ini:

- a. Memantapkan posisi dan citra IAIN Pontianak di tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional.
- b. Meningkatkan peran IAIN Pontianak melalui kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan kajian keislaman, keilmuan, dan kebudayaan Borneo, serta mengabdikannya untuk kepentingan masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan.
- c. Menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia, moderat, cerdas, mandiri dan bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan.
- d. Meningkatkan kinerja IAIN Pontianak melalui organisasi, birokrasi, dan tata kelola yang prima (bersih, adil, efektif, efisien, terukur, terbuka dan akuntabel).

- e. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengatasi berbagai masalah lokal, nasional, regional, dan global.

B. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama No. 94 tahun 2013 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, maka IAIN Pontianak mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang meliputi program pendidikan akademik, vokasi dan/atau profesi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi keagamaan Islam.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Institut menjalankan fungsi: a. perumusan dan penetapan visi, misi, kebijakan, dan perencanaan program; b. penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan akademik, vokasi dan/atau profesi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi keagamaan Islam; c. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika; dan d. pelaksanaan administrasi dan pelaporan.

C. Perjanjian Kinerja (Perjanjian Kinerja) IAIN Pontianak Tahun 2020

Dokumen yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan Indikator Kinerja Utama (IKU) IAIN Pontianak Tahun 2020 adalah Perjanjian Kinerja (Perjanjian Kinerja) IAIN Pontianak tahun 2020 yang telah ditandatangani oleh Rektor IAIN Pontianak dan Direktur Jenderal Pendidikan Islam. Perjanjian Kinerja IAIN Pontianak 2020 sebagai berikut:

Tabel. 1
Perjanjian Kinerja IAIN Pontianak Tahun 2020

Kode	Tujuan/Sasaran Strategis/Sasaran Program	Indikator Kinerja		Capaian 2019	Target 2024	Target Kinerja Th 2020
Tujuan 2: Peningkatan kualitas kerukunan umat beragama						
SS2	Meningkatnya kerukunan umat beragama	Indeks kerukunan umat beragama				
SP	Menguatnya sistem pendidikan yang berperspektif moderat	1	Persentase Mahasiswa yang dibina dalam Moderasi beragama	23,36%	90%	30%
		2	Persentase dosen yang dibina dalam moderasi beragama	71,63%	100%	80%
Tujuan 4 : Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan berkualitas						

SS6	Meningkatnya kualitas pembelajaran dan pengajaran	1	Rerata Nilai Indeks Prestasi Kumulatif Mahasiswa			
SP	Meningkatnya dosen yang memenuhi standar kompetensi	1	Persentase dosen bersertifikat pendidik	65,38%	95%	70%
		2	Persentase Prodi yang menyelenggarakan pembelajaran daring	5%	95%	100%
		3	Persentase Dosen yang memperoleh peningkatan kompetensi	11,30%	90%	10%
SS7	Meningkatnya pemerataan akses pendidikan yang berkualitas	1	APK PTKI			
	Meningkatnya partisipasi anak usia 19 tahun ke atas	1	Persentase peningkatan jumlah mahasiswa Baru Strata 1	11,98%	27%	39,98%
		2	Persentase Prodi yang memenuhi standar sarana prasarana Perguruan Tinggi	50%	95%	50%
SP	Meningkatnya pemberian biaya pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat	1	Persentase Anggaran BOPTN terhadap Total Anggaran	4,74%	15%	8,57%
		2	Persentase mahasiswa penerima PIP Kuliah/Bidikmisi	6,90%	25%	24,12%
		3	Persentase mahasiswa penerima Beasiswa PPA	0,55%	25%	0%
		4	Persentase mahasiswa Penelirma Beasiswa Tahfidz	0,14%	25%	0%
		5	Persentase Mahasiswa Penerima Beasiswa Afirmasi (UP4B)	0%	0%	0%
		6	Jumlah mahasiswa asing yang menerima beasiswa	0%	5%	0%
		7	Persentase mahasiswa Lulusan S1 langsung memperoleh beasiswa Program Magister Lanjut Doktor	0%	10%	0%
SS9	Meningkatnya kualitas penjaminan mutu pendidikan	1	Persentase Prodi yang terakreditasi A/Unggul			
SP	Meningkatnya standar mutu pendidikan	1	Persentase Program Studi yang memenuhi Akreditasi A/Unggul	5,56%	60%	10%
		3	Persentase Program Studi yang menyelenggarakan Sistem Kampus Merdeka	0%	100%	25%
		4	Jumlah Program Studi diafirmasi dalam meningkatkan status akreditasi	5,56%	83,33%	25%
		5	Persentase Dosen yang menjadi Narasumber Konferensi nasional maupun internasional	2,26%	6%	3,16%
		6	Persentase mahasiswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	0,52%	2,63%	0,80%
SS10	Meningkatnya kualitas tata kelola pendidikan	1	Persentase PTK yang sesuai SPM			

SP	Menguatnya pembiayaan dan efektivitas pemanfaatan anggaran pendidikan	1	Persentase anggaran PNBP dan PNBP-BLU terhadap seluruh Sumber Dana Pendidikan	26,92%	33,88%	32,24%
SS11	Meningkatnya kualitas mental/karakter Mahasiswa	1	Indeks karakter siswa			
SP	Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan keperamukaan	1	Persentase Mahasiswa yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan	0,20%	2%	0%
		2	Persentase mahasiswa yang mengikuti pembinaan pramuka	0,98%	2,63%	3,80%
Tujuan 5 : Peningkatan lulusan pendidikan yang produktif dan memiliki daya saing komparatif						
SS12	Meningkatnya kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi	1	Persentase lulusan Prodi Vokasi yang terserap di dunia kerja			
SP	Meningkatnya kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerjasama dengan dunia kerja/industri	1	Persentase Prodi yang bekerjasama dengan dunia kerja/industri	5,56%	83,33%	10%
		2	Jumlah Program Pelatihan Vokasi yang Dilakukan	0%	10%	0%
		3	Jumlah Dosen/Instruktur Program Pendidikan Vokasi yang mengikuti Peningkatan Kompetensi	0%	4,35%	0%
SS13	Menguatnya pendidikan tinggi yang berkualitas	1	Persentase PTK yang memiliki prodi/kelas internasional	0%	3,33%	0%
		2	Persentase lulusan PTK yang bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan	8,57%	20%	9,33%
		3	Persentase artikel ilmiah di jurnal internasional	25%	53,33%	10%
		4	Persentase artikel ilmiah di jurnal internasional yang disitasi	25%	53,33%	10%
SP	Meningkatnya jumlah mahasiswa asing	1	Persentase mahasiswa asing	0,04%	0,17%	0%
SP	Meningkatnya jumlah lulusan yang diterima di dunia kerja	1	Persentase lulusan yang langsung bekerja	8,57%	20%	9,33%
		2	Rerata masa tunggu lulusan sebelum memperoleh pekerjaan	1 TH	0,5 TH	1 TH
SP	Meningkatnya kualitas Prodi Berstandar Internasional	1	Persentase Program Studi yang memenuhi Standar Akreditasi Internasional	0%	3,33%	0%
SP	Meningkatnya kualitas dan pemanfaatan penelitian	1	Persentase hasil penelitian yang memperoleh HAKI	98,26%	100%	87,50%
		2	Persentase hasil penelitian yang menghasilkan Hak Paten	0%	5%	0%
		3	Persentase dosen yang memperoleh pendampingan penulisan artikel ilmiah tingkat internasional	0,56%	2,17%	0%

SP	Meningkatnya kualitas lulusan	1	Rerata lama masa studi mahasiswa S1	4,5 TH	4,5 TH	4,5 TH
Tujuan 6 : Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif						
SS14	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel	1	Predikat opini laporan keuangan			
		2	Nilai reformasi birokrasi			
SP	Meningkatnya tata kelola organisasi yang efektif dan akuntabel	1	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan	100%	100%	100%
		2	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	0	85	0%
		3	Persentase keselarasan perencanaan program dan anggaran sesuai Renstra	70%	90%	70%
		4	Nilai capaian kinerja anggaran terhadap pencapaian output belanja	98,28%	99,05%	85%
		5	Penatausahaan BMN yang akuntabel	95%	95%	90%
		6	Persentase jenis layanan publik yang memiliki SOP	91,67%	100%	93,33%

NO	PROGRAM KINERJA	ANGGARAN
1	Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam	37.469.432.000
2	Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis lainnya Pendidikan Islam	38.826.619.000
	Jumlah	76.296.051.000

NO	SUMBER DANA	ANGGARAN (Rp.)
1	Rupiah Murni	46,491,308,000
2	PNPB	25,018,943,000
3	P/HLN	-
4	HDN	-
5	SBSN	4,785,800,000
	JUMLAH	76,296,051,000

Adapun Perjanjian Kinerja IAIN Pontianak secara lengkap terlampir.

BAB IV

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020

A. SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis yang ditetapkan untuk menentukan IKU IAIN Pontianak menggunakan sasaran program yang telah disepakati dalam Perjanjian Kinerja IAIN Pontianak tahun 2020 yaitu

1. Sasaran Strategis 1:
Meningkatnya kerukunan umat beragama
2. Sasaran Strategis 2:
Meningkatnya kualitas Pembelajaran dan Pengajaran
3. Sasaran Strategis 3:
Meningkatnya Pemerataan Akses Pendidikan yang Berkualitas
4. Sasaran Strategis 4:
Meningkatnya kualitas Penjaminan Mutu Pendidikan
5. Sasaran Strategis 5:
Meningkatnya kualitas Tata Kelola Pendidikan
6. Sasaran Strategis 6:
Meningkatnya Kualitas Mental/Karakter Mahasiswa
7. Sasaran Strategis 7:
Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
8. Sasaran Strategis 8:
Menguatnya Pendidikan Tinggi yang Berkualitas
9. Sasaran Strategis 9:
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Transparan dan Akuntabel

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama dari setiap sasaran strategis di atas sebagai berikut:

1. IKU dari Sasaran Strategis 1 adalah Indeks Kerukunan Umat Beragama
2. IKU dari Sasaran Strategis 2 adalah Rerata Nilai Indeks Prestasi Kumulatif Mahasiswa
3. IKU dari Sasaran Strategis 3 adalah Angka Partisipasi Kotor (APK) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI)
4. IKU dari Sasaran Strategis 4 adalah Persentase Program Studi yang Terakreditasi A/Unggul

5. IKU dari Sasaran Strategis 5 adalah Presentasi Perguruan Tinggi Keagamaan yang sesuai SPM.
6. IKU dari Sasaran Strategis 6 adalah Indeks Karakter Mahasiswa
7. IKU dari Sasaran Strategis 7 adalah Persentase Lulusan Program Studi Vokasi yang terserap di dunia kerja.
8. IKU dari Sasaran Strategi 8 adalah :
 - a. Prosentase Perguruan Tinggi Keagamaan yang memiliki Program Studi/Kelas International.
 - b. Prosentase Lulusan Perguruan Tinggi Keagamaan yang bekerja dalam Jangka Waktu 1 Tahun setelah Kelulusan.
 - c. Prosentase Artikel Ilmiah di Jurnal International.
 - d. Prosentase Artikel Ilmiah di Jurnal International yang disitasi.
9. IKU dari Sasaran Startegis 9 adalah :
 - a. Predikat Opini Laporan Keuangan
 - b. Nilai Reformasi Birokrasi

Tabel 2

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama IAIN Pontianak Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Meningkatnya kerukunan umat beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama
2	Meningkatnya kualitas Pembelajaran dan Pengajaran	Rerata Nilai Indeks Prestasi Kumulatif Mahasiswa
3	Meningkatnya Pemerataan Akses Pendidikan yang Berkualitas	Angka Partisipasi Kotor (APK) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI)
4	Meningkatnya kualitas Penjaminan Mutu Pendidikan	Persentase Program Studi yang Terakreditasi A/Unggul
5	Meningkatnya kualitas Tata Kelola Pendidikan	Presentasi Perguruan Tinggi Keagamaan yang sesuai SPM.
6	Meningkatnya Kualitas Mental/Karakter Mahasiswa	Indeks Karakter Mahasiswa
7	Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Persentase Lulusan Program Studi Vokasi yang terserap di dunia kerja.
8	Menguatnya Pendidikan Tinggi yang Berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> a. Prosentase Perguruan Tinggi Keagamaan yang memiliki Program Studi/Kelas International. b. Prosentase Lulusan Perguruan Tinggi Keagamaan yang bekerja dalam Jangka Waktu 1 Tahun setelah Kelulusan.

		c. Prosentase Artikel Ilmiah di Jurnal International. d. Prosentase Artikel Ilmiah di Jurnal International yang disitasi.
9	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kepemerintahan Yang Efektif, Transparan dan Akuntabel	a. Predikat Opini Laporan Keuangan b. Nilai Reformasi Birokrasi

Selanjutnya IKU akan dijabarkan menjadi Indikator Kinerja yang disesuaikan dengan Indikator Kinerja yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja IAIN Pontianak 2020, sebagai berikut:

Tabel. 3
Indikator Kinerja IAIN Pontianak Tahun 2020

Kode	Tujuan/Sasaran Strategis/Sasaran Program	Indikator Kinerja		Capaian 2019	Target 2024	Target Kinerja Th 2020
Tujuan 2: Peningkatan kualitas kerukunan umat beragama						
SS2	Meningkatnya kerukunan umat beragama	Indeks kerukunan umat beragama				
SP	Menguatnya sistem pendidikan yang berperspektif moderat	1	Persentase Mahasiswa yang dibina dalam Moderasi beragama	23,36%	90%	30%
		2	Persentase dosen yang dibina dalam moderasi beragama	71,63%	100%	80%
Tujuan 4 : Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan berkualitas						
SS6	Meningkatnya kualitas pembelajaran dan pengajaran	1	Rerata Nilai Indeks Prestasi Kumulatif Mahasiswa			
SP	Meningkatnya dosen yang memenuhi standar kompetensi	1	Persentase dosen bersertifikat pendidik	65,38%	95%	70%
		2	Persentase Prodi yang menyelenggarakan pembelajaran daring	5%	95%	100%
		3	Persentase Dosen yang memperoleh peningkatan kompetensi	11,30%	90%	10%
SS7	Meningkatnya pemerataan akses pendidikan yang berkualitas	1	APK PTKI			
SP	Meningkatnya partisipasi anak usia 19 tahun ke atas	1	Persentase peningkatan jumlah mahasiswa Baru Strata 1	11,98%	27%	39,98%
		2	Persentase Prodi yang memenuhi standar sarana prasarana Perguruan Tinggi	50%	95%	50%
	Meningkatnya pemberian biaya pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah	1	Persentase Anggaran BOPTN terhadap Total Anggaran	4,74%	15%	8,57%
		2	Persentase mahasiswa penerima PIP Kuliah/Bidikmisi	6,90%	25%	24,12%

	afirmasi, dan berbakat	3	Persentase mahasiswa penerima Beasiswa PPA	0,55%	25%	0%
		4	Persentase mahasiswa Penelirma Beasiswa Tahfidz	0,14%	25%	0%
		5	Persentase Mahasiswa Penerima Beasiswa Afirmasi (UP4B)	0%	0%	0%
		6	Jumlah mahasiswa asing yang menerima beasiswa	0%	5%	0%
		7	Persentase mahasiswa Lulusan S1 langsung memperoleh beasiswa Program Magister Lanjut Doktor	0%	10%	0%
SS9	Meningkatnya kualitas penjaminan mutu pendidikan	1	Persentase Prodi yang terakreditasi A/Unggul			
SP	Meningkatnya standar mutu pendidikan	1	Persentase Program Studi yang memenuhi Akreditasi A/Unggul	5,56%	60%	10%
		3	Persentase Program Studi yang menyelenggarakan Sistem Kampus Merdeka	0%	100%	25%
		4	Jumlah Program Studi diafirmasi dalam meningkatkan status akreditasi	5,56%	83,33%	25%
		5	Persentase Dosen yang menjadi Narasumber Konferensi nasional maupun internasional	2,26%	6%	3,16%
		6	Persentase mahasiswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	0,52%	2,63%	0,80%
SS10	Meningkatnya kualitas tata kelola pendidikan	1	Persentase PTK yang sesuai SPM			
SP	Menguatnya pembiayaan dan efektivitas pemanfaatan anggaran pendidikan	1	Persentase anggaran PNBPN dan PNBPN-BLU terhadap seluruh Sumber Dana Pendidikan	26,92%	33,88%	32,24%
SS11	Meningkatnya kualitas mental/karakter Mahasiswa	1	Indeks karakter siswa			
SP	Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan keperamukaan	1	Persentase Mahasiswa yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan	0,20%	2%	0%
		2	Persentase mahasiswa yang mengikuti pembinaan pramuka	0,98%	2,63%	3,80%
Tujuan 5 : Peningkatan lulusan pendidikan yang produktif dan memiliki daya saing komparatif						
SS12	Meningkatnya kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi	1	Persentase lulusan Prodi Vokasi yang terserap di dunia kerja			
SP	Meningkatnya kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerjasama dengan dunia kerja/industri	1	Persentase Prodi yang bekerjasama dengan dunia kerja/industri	5,56%	83,33%	10%
		2	Jumlah Program Pelatihan Vokasi yang Dilakukan	0%	10%	0%

		3	Jumlah Dosen/Instruktur Program Pendidikan Vokasi yang mengikuti Peningkatan Kompetensi	0%	4,35%	0%
SS13	Menguatnya pendidikan tinggi yang berkualitas	1	Persentase PTK yang memiliki prodi/kelas internasional	0%	3,33%	0%
		2	Persentase lulusan PTK yang bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan	8,57%	20%	9,33%
		3	Persentase artikel ilmiah di jurnal internasional	25%	53,33%	10%
		4	Persentase artikel ilmiah di jurnal internasional yang disitasi	25%	53,33%	10%
SP	Meningkatnya jumlah mahasiswa asing	1	Persentase mahasiswa asing	0,04%	0,17%	0%
SP	Meningkatnya jumlah lulusan yang diterima di dunia kerja	1	Persentase lulusan yang langsung bekerja	8,57%	20%	9,33%
		2	Rerata masa tunggu lulusan sebelum memperoleh pekerjaan	1 TH	0,5 TH	1 TH
SP	Meningkatnya kualitas Prodi Berstandar Internasional	1	Persentase Program Studi yang memenuhi Standar Akreditasi Internasional	0%	3,33%	0%
SP	Meningkatnya kualitas dan pemanfaatan penelitian	1	Persentase hasil penelitian yang memperoleh HAKI	98,26%	100%	87,50%
		2	Persentase hasil penelitian yang menghasilkan Hak Paten	0%	5%	0%
		3	Persentase dosen yang memperoleh pendampingan penulisan artikel ilmiah tingkat internasional	0,56%	2,17%	0%
SP	Meningkatnya kualitas lulusan	1	Rerata lama masa studi mahasiswa S1	4,5 TH	4,5 TH	4,5 TH
Tujuan 6 : Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif						
SS14	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel	1	Predikat opini laporan keuangan			
		2	Nilai reformasi birokrasi			
SP	Meningkatnya tata kelola organisasi yang efektif dan akuntabel	1	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan	100%	100%	100%
		2	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	0	85	0%
		3	Persentase keselarasan perencanaan program dan anggaran sesuai Renstra	70%	90%	70%
		4	Nilai capaian kinerja anggaran terhadap pencapaian output belanja	98,28%	99,05%	85%
		5	Penatausahaan BMN yang akuntabel	95%	95%	90%
		6	Persentase jenis layanan publik yang memiliki SOP	91,67%	100%	93,33%

BAB V

PENUTUP

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) IAIN Pontianak telah dilaksanakan dalam rangka meyakinkan informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja (LKj) sebagai parameter terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra dan RKA-K/L di unit kerja IAIN Pontianak. Selain itu juga dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007, tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU), bahwa Instansi Pemerintah Wajib menyusun dan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja.

Dokumen IKU IAIN Pontianak selanjutnya merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah tersusun dalam Renstra dan RKA-K/L Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak. Setiap unsur pimpinan pada tingkatan struktur organisasi IAIN Pontianak, yaitu pejabat eselon IV, III, II, dan I harus selalu siap mengemban amanah dan dapat mempertanggungjawabkan kinerja pencapaian program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra dan RKA-K/L sesuai kedudukan dan tugasnya. Selanjutnya pemantauan, pengendalian dan evaluasi harus terus menerus dilakukan secara berkesinambungan terhadap pelaksanaan rencana yang telah ditetapkan dalam Renstra dan RKA-K/L.

Pontianak, Maret 2020

REKTOR



DR. H. SYARIF, S. AG., MA

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Syarif**
Jabatan: : **Rektor IAIN Pontianak**
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Kamaruddin Amin**
Jabatan: : **Direktur Jenderal Pendidikan Islam**
Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

Kode	Tujuan/Sasaran Strategis/Sasaran Program	Indikator Kinerja	Capaian 2019	Target 2024	Target Kinerja Th 2020	
Tujuan 2: Peningkatan kualitas kerukunan umat beragama						
SS2	Meningkatnya kerukunan umat beragama	Indeks kerukunan umat beragama				
SP	Menguatnya sistem pendidikan yang berspektif moderat	1	Persentase Mahasiswa yang dibina dalam Moderasi beragama	23,36%	90%	30%
		2	Persentase dosen yang dibina dalam moderasi beragama	71,63%	100%	80%
		3				
		4				
Tujuan 4 : Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan berkualitas						
SS6	Meningkatnya kualitas pembelajaran dan pengajaran	1 Rerata Nilai Indeks Prestasi Kumulatif Mahasiswa				
SP	Meningkatnya dosen yang memenuhi standar kompetensi	1	Persentase dosen bersertifikat pendidik	65,38%	95%	70%
		2	Persentase Prodi yang menyelenggarakan pembelajaran daring	5%	95%	100%
		3	Persentase Dosen yang memperoleh peningkatan kompetensi	11,30%	90%	10%
		4				
		5				
SS7	Meningkatnya pemerataan akses pendidikan yang berkualitas	1 APK PTKI				
	Meningkatnya partisipasi anak usia 19 tahun ke atas	1	Persentase peningkatan jumlah mahasiswa Baru Strata 1	11,98%	27%	39,98%
		2	Persentase Prodi yang memenuhi standar sarana prasarana Perguruan Tinggi	50%	95%	50%
		3				
		4				
SP	Meningkatnya pemberian biaya pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat	1	Persentase Anggaran BOPTN terhadap Total Anggaran	4,74%	15%	8,57%
		2	Persentase mahasiswa penerima PIP Kuliah/Bidikmisi	6,90%	25%	24,12%
		3	Persentase mahasiswa penerima Beasiswa PPA	0,55%	25%	0%
		4	Persentase mahasiswa Penelirma Beasiswa Tahfidz	0,14%	25%	0%
		5	Persentase Mahasiswa Penerima Beasiswa Afirmasi (JP4B)	0%	0%	0%
		6	Jumlah mahasiswa asing yang menerima beasiswa	0%	5%	0%
		7	Persentase mahasiswa Lulusan S1 langsung memperoleh beasiswa Program Magister Lanjut	0%	10%	0%
		8				
		9				
SS9	Meningkatnya kualitas penjaminan mutu pendidikan	1 Persentase Prodi yang terakreditasi A/Unggul				
SP	Meningkatnya standar mutu pendidikan	1	Persentase Program Studi yang memenuhi Akreditasi A/Unggul	5,56%	60%	10%
		3	Persentase Program Studi yang menyelenggarakan Sistem Kampus Merdeka	0%	100%	25%
		4	Jumlah Program Studi diafirmasi dalam meningkatkan status akreditasi	5,56%	83,33%	25%
		5	Persentase Dosen yang menjadi Narasumber Konferensi nasional maupun internasional	2,26%	6%	3,16%
		6	Persentase mahasiswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	0,52%	2,63%	0,80%
		7				
		8				

Kode	Tujuan/Sasaran Strategis/Sasaran Program	Indikator Kinerja	Capaian 2019	Target 2024	Target Kinerja Th 2020
SS10	Meningkatnya kualitas tata kelola pendidikan	1 Persentase PTK yang sesuai SPM			
SP	Menguatnya pembiayaan dan efektivitas pemanfaatan anggaran pendidikan	1 Persentase anggaran PNBP dan PNBP-BLU terhadap seluruh Sumber Dana Pendidikan	26,92%	33,88%	32,24%
		2			
		3			
SS11	Meningkatnya kualitas mental/karakter Mahasiswa	1 Indeks karakter siswa			
SP	Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan keperumukaan	1 Persentase Mahasiswa yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan	0,20%	2%	0%
		2 Persentase mahasiswa yang mengikuti pembinaan pramuka	0,98%	2,63%	3,80%
		3			
		4			
Tujuan 5 : Peningkatan lulusan pendidikan yang produktif dan memiliki daya saing komparatif					
SS12	Meningkatnya kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi	1 Persentase lulusan Prodi Vokasi yang terserap di dunia kerja			
SP	Meningkatnya kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerjasama dengan dunia kerja/industri	1 Persentase Prodi yang bekerjasama dengan dunia kerja/industri	5,56%	83,33%	10%
		2 Jumlah Program Pelatihan Vokasi yang Dilakukan	0%	10%	0%
		3 Jumlah Dosen/Instruktur Program Pendidikan Vokasi yang mengikuti Peningkatan Kompetensi	0%	4,35%	0%
		4			
		5			
SS13	Menguatnya pendidikan tinggi yang berkualitas	1 Persentase PTK yang memiliki prodi/kelas internasional	0%	3,33%	0%
		2 Persentase lulusan PTK yang bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan	8,57%	20%	9,33%
		3 Persentase artikel ilmiah di jurnal internasional	25%	53,33%	10%
		4 Persentase artikel ilmiah di jurnal internasional yang disitasi	25%	53,33%	10%
SP	Meningkatnya jumlah mahasiswa asing	1 Persentase mahasiswa asing	0,04%	0,17%	0%
		2			
		3			
SP	Meningkatnya jumlah lulusan yang diterima di dunia kerja	1 Persentase lulusan yang langsung bekerja	8,57%	20%	9,33%
		2 Rerata masa tunggu lulusan sebelum memperoleh pekerjaan	1 TH	0,5 TH	1 TH
		3			
		4			
SP	Meningkatnya kualitas Prodi Berstandar Internasional	1 Persentase Program Studi yang memenuhi Standar Akreditasi Internasional	0%	3,33%	0%
		2			
		3			
SP	Meningkatnya kualitas dan pemanfaatan penelitian	1 Persentase hasil penelitian yang memperoleh HAKI	98,26%	100%	87,50%
		2 Persentase hasil penelitian yang menghasilkan Hak Paten	0%	5%	0%
		3 Persentase dosen yang memperoleh pendampingan penulisan artikel ilmiah tingkat internasional	0,56%	2,17%	0%
		4			
		5			

Kode	Tujuan/Sasaran Strategis/Sasaran Program	Indikator Kinerja	Capaian 2019	Target 2024	Target Kinerja Th 2020
SP	Meningkatnya kualitas lulusan	1 Rerata lama masa studi mahasiswa S1	4,5 TH	4,5 TH	4,5 TH
		2			
		3			
Tujuan 6 : Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif					
SS14	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel	1 Predikat opini laporan keuangan			
		2 Nilai reformasi birokrasi			
SP	Meningkatnya tata kelola organisasi yang efektif dan akuntabel	1 Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan	100%	100%	100%
		2 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	0	85	0%
		3 Persentase keselarasan perencanaan program dan anggaran sesuai Renstra	70%	90%	70%
		4 Nilai capaian kinerja anggaran terhadap pencapaian output belanja	98,28%	99,05%	85%
		5 Penatausahaan BMN yang akuntabel	95%	95%	90%
		6 Persentase jenis layanan publik yang memiliki SOP	91,67%	100%	93,33%

No	Program dan Kegiatan	Anggaran
1	Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam	Rp. 37.454.987.000
2	Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam	Rp. 40.156.656.000
Jumlah Seluruh		Rp. 77.611.643.000

No	Sumber Dana	Anggaran (Rp)
1	Rupiah Mumi	Rp. 52.592.700.000
2	PNBP	Rp. 25.018.943.000
3	P/HLN	-
4	HDN	-
5	SBSN	-
JUMLAH		Rp. 77.611.643.000

Penjelasan

1. Apabila belum ada capaian silakan dikosongkan
2. Indikator bisa ditambahkan sesuai dengan kebutuhan yang dimiliki satker



PERMETAAN SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN DAN INDIKATOR
 PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM 2020 - 2024
 Berdasarkan RPJMN dan Draft RENSTRA Pendidikan Islam)

Kode	Tujuan/Sasaran Strategis/Sasaran Program	Indikator Kinerja	Capaian 2019	Target 2024	Target 2020	Target Kinerja Tahunan 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Keterangan	Penilaian/Cara Pengukuran	SAT
Tujuan 2: Penguatan Moderasi Beragama dan kerukunan umat beragama												
SS2	Meningkatnya kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama	Indeks kerukunan umat beragama										
SP	Meningkatnya sistem pendidikan yang berpedagogi moderat	1. Persentase Mahasiswa yang dibina dalam Moderasi Beragama (mohon diisi Bag Akademik)	23,36 %	90 %	30%	50 %	70%	80 %	90%	% dari Persentase jumlah mahasiswa yang dibina dalam moderasi beragama dibandingkan dengan Jumlah mahasiswa		%
		2. Persentase dosen yang dibina dalam moderasi beragama (mohon diisi Bag OKH)	71,63 %	100%	80%	90%	100%	100%	100%	% dari Persentase jumlah dosen yang dibina dalam moderasi beragama dibandingkan dengan Jumlah dosen		%
		3										
		4										
Tujuan 4 : Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan berkualitas												
SS6	Meningkatnya kualitas pembelajaran dan Mengembangkan dosen yang memenuhi standar kompetensi	Rerata Nilai Indeks Prestasi Komulatif Mahasiswa										
SP		1. Persentase dosen bersertifikat pendidik (mohon diisi Bag OKH)	65,38 %	95%	70%	85%	90%	95%	95%	% dari Persentase jumlah dosen bersertifikat pendidik dibandingkan dengan Jumlah dosen		%
		2. Persentase Prodi yang menyelenggarakan pembelajaran daring (mohon diisi Bag Akademik)	5%	95%	100%	90%	93%	94%	95%	Jelas Persentase jumlah Prodi yang menyelenggarakan pembelajaran daring dibandingkan dengan Jumlah prodi		%
		3. Persentase Dosen yang memperoleh peningkatan kompetensi (mohon diisi Bag Akademik/ Prodi)	11,30 %	90%	10%	30%	50%	70%	90%	Jelas Persentase jumlah Dosen yang memperoleh peningkatan kompetensi dibandingkan dengan jumlah dosen (contoh : Short course, post doctoral, pengliman dosen untuk mengikut seminar, pelatihan dll)		%
		4										
		5										
SS7	Meningkatnya pemerataan akses pendidikan yang berkualitas Mengembangkan pascasarjana anak usia 19 tahun ke atas	1. APK PTN										
		1. Persentase peningkatan jumlah mahasiswa Baru Strata 1 (mohon diisi Bag Admisi)	11,98%	26,67%	39,98 %	20%	23%	29%	26,67%	% dari mahasiswa baru ST tahun berjalan dikurangi Jumlah mahasiswa baru ST tahun sebelumnya dibagi jumlah mahasiswa tahun sebelumnya dikalikan 100		%
		2. Persentase Prodi yang memenuhi standar sarana prasarana Perguruan Tinggi (mohon diisi LPM)	50%	95%	50%	70%	90%	90%	95%	% dari Persentase jumlah Prodi yang memenuhi standar sarana prasarana Perguruan Tinggi dibandingkan dengan jumlah prodi berdasarkan Standar Akreditasi Program Studi		%
		3										
		4										
SP	Meningkatnya pemberian biaya pendidikan bagi anak kurang mampu daerah afirmasi dan berbakat	1. Persentase Anggaran BOP/PTN terhadap Total Anggaran (Bag Perencanaan)	4,74%	16,00%	8,57%	10%	12%	14%	15%	Jelas Jumlah Anggaran BOP/PTN		Rp
		2. Persentase mahasiswa penerima PIP Kuliah/Bidikmisi (Bag Kemahasiswaan)	6,90%	25%	24,12%	25%	25%	25%	25%	% dari Persentase jumlah mahasiswa penerima PIP Kuliah/Bidikmisi dibandingkan dengan Jumlah mahasiswa		%
		3. Persentase mahasiswa penerima Beasiswa PPA (Bag Kemahasiswaan)	0,55%	25%	0%	25%	25%	25%	25%	% dari Persentase jumlah mahasiswa penerima Beasiswa PPA dibandingkan dengan Jumlah mahasiswa		%
		4. Persentase mahasiswa Peneliti/ma Beasiswa Tarifaz (Bag Kemahasiswaan)	0,14%	25%	0%	25%	25%	25%	25%	% dari Persentase jumlah mahasiswa Peneliti/ma Beasiswa Tarifaz dibandingkan dengan Jumlah mahasiswa		%
		5. Persentase Mahasiswa Penerima Beasiswa Afirmasi (UP-4B) (Bag Kemahasiswaan)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	% dari Persentase Mahasiswa Penerima Beasiswa Afirmasi (UP-4B) dibandingkan dengan Jumlah mahasiswa		%
		6. Jumlah mahasiswa asing yang menerima beasiswa (mohon diisi CDC/CA)	0%	5%	0%	5%	5%	5%	5%	Jumlah mahasiswa asing yang menerima beasiswa		Orang
		7. Persentase mahasiswa Lulusan ST langsung memperoleh beasiswa Program Magister Lanjut Doktor	0%	10%	0%	10%	10%	10%	10%	% dari Persentase jumlah mahasiswa Lulusan ST langsung memperoleh beasiswa Program Magister lanjut Doktor dibandingkan Jumlah		%
		8										
		9										
SS9	Meningkatnya kualitas penjaminan mutu pendidikan	1. Persentase Prodi yang terakreditasi A/Urung										
SP	Meningkatnya standar mutu pendidikan	1. Persentase Program Studi yang memenuhi Akreditasi A/Urung (mohon diisi LPM)	5,56%	60%	10%	18,18%	32%	42,86%	60%	% dari Persentase jumlah Program Studi yang memenuhi Standar Akreditasi A/Urung dibandingkan dengan Jumlah prodi		%
		3. Persentase Program Studi yang menyelenggarakan Sistem Kampus Merdeka (mohon diisi LPM)	0%	100%	25%	100%	100%	100%	100%	% dari Persentase jumlah Program Studi yang menyelenggarakan Sistem Kampus Merdeka dibandingkan dengan Jumlah prodi		%
		4. Jumlah Program Studi difinansi dalam meningkatkan status akreditasi (mohon diisi LPM)	5,56%	83,33%	25%	45,45%	60%	64%	83,33%	Jumlah Program Studi difinansi dalam meningkatkan status akreditasi		%

Kode	Tujuan/Sasaran Strategis/Sasaran Program	Indikator Kinerja	Capaian					Keberhasilan	Penilaian/Cara Pengukuran	SAT				
			2019	Target 2024	2020	2021	2022				2023	2024		
SS10	Meningkatnya kualitas tata kelola pendidikan	Peningkatan Pembinaan dan Efektifitas Pemeliharaan Anggaran Pendidikan	1	25,92%	33,88%	32,24%	32,67%	33,07%	33,49	33,89%	% dari Target	Penentase jumlah anggaran PnBP dan PnBP-BLU dibandingkan dengan jumlah alokasi anggaran tahun berjalan	%	
			2											
			3											
			4											
			5											
			6											
			7											
			8											
SS11	Meningkatnya kualitas mental/kepribadian Mahasiswa	Kepeloporan dan Keselamatan Pemuda dan Pengembangan Pendidikan Keperguruan	1	0,20%	2%	0%	0,87%	0,81%	1,11%	1,75%	% dari Target	Penentase Mahasiswa yang mengikuti pembinaan dengan total mahasiswa	%	
			2	0,98%	2,63%	3,80%	3,87%	3,51%	3,11%	2,63%	% dari Target	Penentase Mahasiswa yang mengikuti pembinaan dengan total mahasiswa	%	
			3											
			4											
Tujuan 5 : Peningkatan Luasan Pendidikan yang produktif dan memiliki daya saing komparatif														
SS12	Meningkatnya kualitas pendidikan dan penelitian vokasi berbasis kerjasama dengan dunia keja/industri	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Penelitian Vokasi Berbasis Kerjasama dengan Dunia Keja/Industri	1	5,59%	83,33%	10%	22,73%	40%	64,29%	83,33%	% dari Target	Penentase Prodi yang bekerjasama dengan dunia keja/industri dibandingkan dengan jumlah prodi	%	
			2	0%	10%	0%	4,55%	8%	17,86%	10%	% dari Target	Jumlah Program Pasca Sarjana Vokasi	Lembaga	
			3	0%	4,35%	0%	0,53%	0,95%	2,38%	4,35%	% dari Target	Jumlah Dosen/Instruktur Program Pendidikan Vokasi yang mengikuti Peningkatan Kompetensi	Orang	
			4											
			5											
SS13	Meningkatnya pendidikan tinggi yang berkualitas	Peningkatan Kualitas Pendidikan Tinggi yang Berkualitas	1	0%	3,33%	0%	0%	0%	0%	3,33%	% dari Target	Jumlah Prodi Internasional dibandingkan dengan Jumlah Prodi	%	
			2	8,57%	20%	9,33%	10%	15%	16,67%	20%	% dari Target	Jumlah Luasan Bakuja dibandingkan jumlah luasan setiap Tahun	%	
			3	25%	53,33%	10%	30%	30%	26,67%	53,33%	% dari Target	Jumlah artikel terpublikasi Jurnal Internasional dibandingkan jumlah Jurnal Internasional	%	
			4	25%	53,33%	10%	30%	30%	26,67%	53,33%	% dari Target	Jumlah mahasiswa asing dibandingkan dengan jumlah mahasiswa	%	
SP	Meningkatnya jumlah luasan yang diterima di dunia kerja	Peningkatan Jumlah Luasan yang Diterima di Dunia Kerja	1	8,57%	20%	9,33%	10%	15%	16,67%	20%	Jelas	Penentase jumlah luasan yang langsung bekerja dibandingkan dengan jumlah luasan pada tahun berjalan	%	
			2		0,5 THN	1 THN	1 THN	1 THN	1 THN	0,5 THN	% dari Target	Renda masa tunggu luasan sebelum memperoleh pekerjaan	Nilai	
			3											
			4											
SP	Meningkatnya kualitas Prodi Berstandar Internasional	Peningkatan Kualitas Prodi Berstandar Internasional	1	0%	3,33%	0%	0%	0%	0%	3,33%	% dari Target	Penentase jumlah Program Studi yang memenuhi Standar Akreditasi Internasional dibandingkan dengan jumlah prodi	%	
			2											

Kode	Tujuan/Sasaran Strategis/Sasaran Program	Indikator Kinerja	Capaian		Target				Target Kinerja Tahunan				Keterangan	Penjelasan/Cara Pengukuran	SAT	
			2019	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022				2023
		3														
GP	Meningkatnya kualitas dan pematangan penelitian	1	Persentase hasil penelitian yang memperoleh HAKI (mhn diis LPPM)	90,28%	100%	87,50%	83,33%	83,33%	100%	100%	% dari Target	Persentase hasil penelitian yang memperoleh HAKI dibandingkan dengan jumlah hasil penelitian	%			
		2	Persentase hasil penelitian yang menghasilkan Hak Paten (mhn diis LPPM)	0%	5%	0%	0%	0%	0%	5%	% dari Target	Persentase hasil penelitian yang menghasilkan Hak Paten dibandingkan dengan jumlah hasil	%			
		3	Persentase dosen yang memperoleh pendampingan penulisan artikel ilmiah tingkat internasional (mhn diis LPPM)	0,50%	2,17%	0%	1,05%	0,85%	0,95%	2,17%	% dari Target	Persentase dosen yang memperoleh pendampingan penulisan artikel ilmiah tingkat internasional dibandingkan dengan jumlah dosen	%			
		4														
		5														
GP	Meningkatnya kualitas lulusan	1	Rata-rata lama masa studi mahasiswa S1 (mhn diis Bag Akademik)	4,5 TH	% dari Target	Rata-rata lama masa studi mahasiswa	Nilai									
		2														
		3														
Tujuan 6: Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif																
SS14	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel	1	Preklat opini laporan keuangan													
		2	Nilai reformasi birokrasi													
SP	Meningkatnya tata kelola organisasi yang efektif dan akuntabel	1	Persentase tindak lanjut hasil pemecahan yang diselesaikan (mhn diis SP)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	% dari Target	Jumlah temuan yang ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah temuan	%			
		2	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) (mhn diis Bag OKH)	0	85	0	0	75	80	85	% dari Target	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai			
		3	Persentase kesesuaian perencanaan program dan anggaran sesuai Rencana (diis Bag Perencanaan)	70%	90%	70%	75%	80%	85%	90%	% dari Target	Persentase kesesuaian perencanaan program dan anggaran sesuai Rencana Salbur	%			
		4	Nilai capaian kinerja anggaran terhadap pencapaian output belanja (diis Bag Perencanaan)	86,28%	90,0%	85%	90%	90%	90%	90,00%	% dari Target	Nilai capaian kinerja anggaran terhadap pencapaian output belanja berdasarkan aplikasi SMART DJA	Nilai			
		5	Perubahanhan BMN yang akuntabel (diis Bag Keuangan)	95%	95%	90%	90%	90%	90%	95%	% dari Target	Memiliki roadmap 5 tahun ke depan (30%), penghapusan eset (20%), penetapan rthul penggunaan (PSP) (25%), pencatatan belanja ke SIMAN-BMN (15%), oprame secara berkala (10%)	%			
		6	Persentase jenis layanan publik yang memiliki SOP (mhn diis LPM)	91,67%	100%	83,33%	86,67%	100%	100%	100%	% dari Target	Persentase jenis layanan publik yang memiliki SOP dibandingkan dengan jumlah layanan	%			

Penjelasan

1. Apabila belum ada contoh silakan dikonstruksi
2. Indikator bisa ditambahkan sesuai dengan kebutuhan yang dimiliki sektor

Pontianak, Januari 2020

Rektor

